

## Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

<sup>1</sup>Muhammad Miftah Falah, <sup>2</sup>Sri Fadilah, dan <sup>3</sup>Edi Sukarmanto

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail : <sup>1</sup>Miftah.falah@gmail.com, <sup>2</sup>Srifadilah71@yahoo.com,

<sup>3</sup>Edi06sukarmanto@gmail.com

**Abstrak** : Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan yang diukur dengan derajat desentralisasi dan rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/kota periode 2013-2014. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dimana sebelumnya data telah diuji dengan pengujian asumsi klasik meliputi normalitas data, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan pengujian asumsi tidak ditemukan variabel yang menyimpang pada dua variabel bebas, yakni Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan. Hal ini menunjukkan data telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Desentralisasi Fiskal tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, variabel Rasio Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan variabel Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap alokasi belanja modal secara simultan.

**Kata kunci** : Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan, Alokasi Belanja Modal

### A. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berkembang di daerah. Dan dari adanya wewenang tersebut tidak hanya mengatur keuangan daerah saja, namun kepengaturan dari sektor non keuanganpun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa daerah itu mampu untuk berotonomi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF). Desentralisasi fiskal itu sendiri dapat memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan kemampuan finansial yang memadai oleh daerah yang otonom. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan juga tentu diharuskan untuk senantiasa menggali setiap potensi daerahnya agar mendapatkan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah daerahnya. Baik itu dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Karena daerah yang mampu memperoleh pendapatan yang lebih dari hasil usahanya sendiri akan mempunyai posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah yang hanya tergantung dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya.

Tantangan yang seringkali dihadapi suatu daerah yang otonom ini adalah adanya peningkatan pendapatan daerah dan sikap kemandirian dalam pembangunan dengan banyaknya kendala ketersediaan sumber daya di daerah yang sangat terbatas. Dalam mewujudkan kemandirian daerah ini tentunya diharapkan pula adanya peningkatan pelayanan oleh pemerintah daerah di berbagai sektor terutama sektor publik. Karena

dengan peningkatan layanan publik ini akan lebih meningkatkan daya tarik bagi para investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentunya akan tercapai apabila ada upaya dan dukungan dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung khususnya investasi. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Dari hasil pemaparan di atas dapat kita cermati bahwa ada suatu keterkaitan antara desentralisasi fiskal, kinerja keuangan dan alokasi belanja modal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Havid Sularso dan Yanuar E. Rerstianto (2011:122) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Namun secara empiris belum ada bukti mengenai keterkaitan langsung antara desentralisasi fiskal dengan alokasi belanja modal. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menguji bagaimana “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal”.

## **B. Kajian Pustaka**

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal menurut Andros M.P Hasugian (2006:7) merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

### **Kinerja Keuangan**

Menurut Sucipto dalam Fajrin Hairul Ansar (2011: 16) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

### **Alokasi Belanja Modal**

Menurut kementerian keuangan republik Indonesia, Direktorat jendral anggaran, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

### **Hipotesis**

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan lagi kebenarannya. Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas. Maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh mengenai Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal
- H<sub>2</sub> : Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

H<sub>3</sub> : Desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal

### C. Metode Penelitian

#### Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2013:215). Dalam penelitian ini populasinya yaitu Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat Tahun 2013-2014. Yang terdiri dari 27 Kabupaten/kota. Dari keseluruhan populasi tersebut digunakan metode target populasi untuk memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### Definisi Operasional Variabel

Menurut Halim (2001:28) Desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal. Apabila digambarkan akan terlihat seperti berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH (Pajak)} + \text{DBH (Bukan Pajak)}}{\text{Realisasi TP Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Menurut Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto (2011:111) derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur rasio derajat desentralisasi fiskal :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio kemandirian (Halim, 2008:230) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

### D. Teknik Analisis Data

#### Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramal bagaimana keadaan variabel independen terhadap variabel dependen.

#### Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali,2001). Apabila hal tersebut tidak

ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari :

- a. Uji normalitas  
Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal.
- b. Pengujian heteroskedastisitas  
Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).
- c. Pengujian multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen..
- d. Pengujian autokorelasi  
Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi.

## E. Pembahasan

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Asumsi regresi yang dilihat adalah asumsi error mengikuti distribusi normal, asumsi bebas kolinearitas, asumsi tidak terdapat heteroskedastis dan asumsi bebas autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,990 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

#### b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dengan nilai VIF sebesar kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *Sig.* yang lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbebas dari adanya heteroskedastisitas, sehingga model memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

#### d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah sebesar 1,847 dan berada diantara angka dU dan 4-dU ( $1,628 < 1,847 < 2,372$ ). Hasil tersebut menunjukkan jika model regresi yang akan dibentuk terbebas dari

adanya autokorelasi, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

### Hasil Estimasi Model Regresi Linier Berganda

**Tabel 6**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,062	1,443		8,360	0,000
	Desentralisasi Fiskal (X1)	0,071	0,058	0,155	1,233	0,224
	Rasio Kemandirian (X3)	0,151	0,034	0,556	4,413	0,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Dari persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 12,062 menunjukkan ketika variabel independen (Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian) tidak berubah atau pada kondisi konstan (bernilai 0), maka Belanja Modal akan bernilai sebesar 12,062%.

Koefisien regresi untuk Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,071 dan bertanda positif, artinya jika Desentralisasi Fiskal mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan Rasio Kemandirian tidak mengalami perubahan (konstan), maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,071%.

Koefisien regresi untuk Rasio Kemandirian ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,151 dan bertanda positif, artinya jika Rasio Kemandirian mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan Desentralisasi Fiskal tidak mengalami perubahan (konstan), maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,151%

### Pengujian Hipotesis Simultan

**Tabel 7**  
**Hasil ANOVA (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	868,101	2	434,050	17,705	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	1201,303	49	24,516		
	Total	2069,404	51			

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Rasio Kemandirian Keuangan (X3), Desentralisasi Fiskal (X1)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Berdasarkan hasil uji  $F$ , diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,705 berada didaerah penolakan  $H_0$  ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) sehingga diperoleh keputusan uji simultan adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dari nilai signifikansi juga dapat dilihat bahwa nilai  $Sig.$  (0,000) lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi Simultan**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,648 <sup>a</sup>	0,419	0,396	4,95140

a. Predictors: (Constant), Rasio Kemandirian Keuangan (X<sub>3</sub>), Desentralisasi Fiskal (X<sub>1</sub>)

b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,419 atau sebesar 41,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 41,9% terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014, sedangkan sebanyak  $(1-R^2)$  58,1% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

### Uji Pengaruh antar variabel penelitian

Rangkuman hasil perhitungan uji *t* pada pengujian hipotesis parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Uji *t* (Parsial)**

Variabel	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{tabel}$	$\alpha$	Keputusan	Keterangan
Desentralisasi Fiskal (X <sub>1</sub> )	1,233	0,224	2,010	0,05	Ho diterima	Tidak Signifikan
Rasio Kemandirian (X <sub>3</sub> )	4,413	0,000	2,010	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS

Interpretasi untuk tabel di atas adalah sebagai berikut:

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan pengujian hipotesis simultan dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,705 berada di daerah penolakan Ho ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) sehingga diperoleh keputusan uji simultan adalah menolak Ho dan menerima Ha. Dari nilai signifikansi juga dapat dilihat bahwa nilai Sig. (0,000) lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014

Keeratan hubungan antara Desentralisasi fiskal dan Rasio kemandirian dengan alokasi belanja modal sebesar 0,648 dan masuk dalam kategori yang cukup kuat. Dari koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 0,419 atau sebesar 41,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian memberikan

kontribusi pengaruh sebesar 41,9% terhadap terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2013-2014, sedangkan sebanyak  $(1-R^2)$  58,1% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal**

Dari hasil uji dapat disimpulkan bahwa secara parsial Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014.

Dari persamaan regresi yang diperoleh, perubahan Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ ) berbanding lurus dengan alokasi belanja modal dengan koefisien bertanda positif sebesar 0,071 dan bertanda positif, artinya jika Desentralisasi Fiskal mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan Rasio Kemandirian tidak mengalami perubahan (konstan), maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,071%.

### **Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal**

Dari hasil uji dapat disimpulkan bahwa secara parsial Rasio kemandirian berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal.

Dari persamaan regresi yang diperoleh, perubahan Rasio Kemandirian ( $X_3$ ) berbanding lurus dengan alokasi belanja modal dengan koefisien bertanda positif sebesar 0,151, artinya jika Rasio Kemandirian mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan Desentralisasi Fiskal tidak mengalami perubahan (konstan), maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,151%

## **F. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014.
2. Rasio Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014.
3. Secara simultan Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan yang diukur dengan Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014.

### **Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah indikator khususnya dalam mengukur kinerja keuangan. Dan melakukan seleksi pada setiap indikator agar tidak terjadi multikorelasi atau adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas.

### **Daftar Pustaka**

Ansar, Fajrin Hairul. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

M.P Hasugian, Andros.2006. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA : Bandung.

Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah*. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman

Zulkifli, Muh. 2013. *Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makasar. Universitas Hasanuddin.

